

Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Para, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe

Katerina Bataha¹ | Donald K. Monintja² | Sintia M. Rawis³

¹ Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

³ Program Studi Sosiologi, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

PENULIS KORESPONDENSI

Katerina Bataha
Universitas Sam Ratulangi
Manado, 95115, Indonesia
Email: katerinabataha@unsrat.ac.id

ORCID

[0009-0006-2912-9838](https://orcid.org/0009-0006-2912-9838)

INFORMASI ARTIKEL

Halaman: 1–6
Bahasa: Indonesia
Sitasi: 2018-2026

Abstract

Capacity building for village officials is essential for strengthening public services and local governance, particularly in remote island settings. This community service programme aimed to improve the capacity of stakeholders in Desa Para to prepare a participatory, evidence-informed, and sustainable Village Medium-Term Development Plan (RPJMDes). The programme involved 15 participants: 10 village officials, three members of the Tourism Awareness Group, and two members of the Village Elders Council. Activities were delivered through interactive lectures, guided practice, and group discussions. Evaluation was formative and qualitative, based on participant engagement, completion of planning exercises, group outputs, and facilitator observations. The process indicated improved understanding of sustainable village development, adaptive governance, community participation, and the strategic function of RPJMDes. Participants were also able to identify local potentials and problems, apply SWOT and needs analyses, formulate strategic objectives, and begin preparing priority-programme matrices. However, the absence of standardized pre- and post-tests means that the magnitude of change could not be quantified. Continued mentoring is required to strengthen data literacy, programme indicators, and finalization of the RPJMDes document.

KEYWORDS *capacity building; village governance; participatory planning; RPJMDes*

Abstrak

Penguatan kapasitas aparatur desa penting untuk memperkuat pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, khususnya pada wilayah kepulauan terpencil. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan di Desa Para dalam menyusun RPJMDes yang partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Kegiatan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas 10 orang perangkat desa, 3 orang anggota Kelompok Sadar Wisata, dan 2 orang anggota Majelis Tua Kampung. Pelaksanaan kegiatan menggunakan ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok. Evaluasi dilakukan secara formatif dan kualitatif berdasarkan keterlibatan peserta, penyelesaian latihan, hasil kerja kelompok, serta pengamatan fasilitator. Hasil evaluasi proses menunjukkan indikasi peningkatan pemahaman mengenai pembangunan desa berkelanjutan, tata kelola adaptif, partisipasi masyarakat, dan fungsi strategis RPJMDes. Peserta juga mulai mampu mengidentifikasi potensi dan masalah desa, menerapkan analisis SWOT dan analisis kebutuhan, merumuskan tujuan strategis, serta menyusun matriks program prioritas. Namun, perubahan tersebut belum dapat diukur karena tidak digunakan instrumen pretest dan posttest yang terstandar. Pendampingan lanjutan diperlukan untuk memperkuat literasi data, perumusan indikator, dan finalisasi dokumen RPJMDes.

KATA KUNCI *penguatan kapasitas; pemerintahan desa; perencanaan partisipatif; RPJMDes*

HIGHLIGHTS

- Evaluasi proses menunjukkan indikasi peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan RPJMDes yang partisipatif dan berbasis data.
- Pelatihan kontekstual membantu peserta menghubungkan potensi wilayah pesisir, kebutuhan masyarakat, dan program prioritas pembangunan desa.
- Model ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok dapat direplikasi pada desa kepulauan dengan penyesuaian konteks dan pendampingan lanjutan.

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil yang memiliki peran strategis dalam menggerakkan pembangunan berbasis potensi lokal dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa untuk merancang dan mengelola pembangunannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 memperbarui ketentuan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa. Perluasan kewenangan tersebut perlu diimbangi dengan kapasitas aparatur yang memadai, terutama pada wilayah kepulauan terpencil yang menghadapi keterbatasan akses dan sumber daya (BPK RI, 2024, 2026).

Kondisi tersebut tercermin di Desa Para, Kecamatan Tatoareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Wilayah ini memiliki karakteristik kepulauan dengan akses transportasi laut yang sangat dipengaruhi kondisi cuaca. Berdasarkan observasi awal dan keterangan mitra, perjalanan dari Tahuna menuju Desa Para memerlukan waktu sekitar 5–6 jam, sedangkan jadwal pelayaran terbatas. Keterbatasan aksesibilitas berdampak pada distribusi logistik, layanan kesehatan dan pendidikan, ketersediaan infrastruktur dasar, serta konektivitas dengan pemerintah kecamatan dan kabupaten. Publikasi statistik Kecamatan Tatoareng juga menunjukkan pentingnya dimensi geografis, sosial, ekonomi, aksesibilitas, dan layanan dasar dalam memahami konteks pembangunan wilayah tersebut (BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe, 2024).

Sasaran kegiatan adalah pemangku kepentingan Desa Para yang terlibat dalam perencanaan pembangunan desa. Peserta terdiri atas 10 orang perangkat desa, 3 orang anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan 2 orang anggota Majelis Tua Kampung (MTK). Pelibatan unsur pemerintah desa dan masyarakat dipilih agar latihan penyusunan RPJMDes tidak hanya berorientasi administratif, tetapi juga dapat mengakomodasi potensi perikanan, wisata bahari, budaya lokal, dan kebutuhan masyarakat.

RPJMDes merupakan instrumen strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, serta prioritas program pembangunan desa. Berdasarkan ketentuan terbaru, RPJM Desa disusun untuk jangka waktu delapan tahun, bukan enam tahun (BPK RI, 2026). Dalam konteks Desa Para, dokumen tersebut diperlukan untuk mengarahkan peningkatan infrastruktur dasar, akses transportasi, layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan potensi ekonomi wilayah pesisir secara partisipatif (Widadi & Eldo, 2023).

Permasalahan utama yang melatarbelakangi kegiatan adalah keterbatasan kapasitas aparatur dalam mengidentifikasi masalah, menentukan prioritas, menyusun program, mengelola data, dan menyiapkan dokumen perencanaan. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa kapasitas pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pemanfaatan sistem informasi berpengaruh terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa (Aminah & Sutanto, 2018; Hertati et al., 2022; Nikodimus, 2022; Nofiarsyah, 2019). Kondisi tersebut dapat menyebabkan RPJMDes kurang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan belum optimal sebagai acuan pengelolaan pembangunan desa.

Penguatan kapasitas aparatur melalui pelatihan dan pendampingan telah digunakan dalam berbagai konteks pemerintahan desa. Hasil kegiatan terdahulu menunjukkan bahwa kombinasi penyampaian materi, latihan teknis, dan pendampingan dapat memperbaiki pemahaman aparatur

mengenai penyusunan RPJMDes dan tata kelola desa (Sari et al., 2022; Sujana et al., 2020). Namun, efektivitas kegiatan sangat dipengaruhi oleh kesesuaian materi dengan kebutuhan peserta dan karakteristik wilayah.

Program peningkatan kapasitas pemerintah desa juga telah direncanakan di Kabupaten Kepulauan Sangihe melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) (Ameliya, 2023). Meskipun demikian, Desa Para masih membutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual karena keterbatasan aksesibilitas, literasi data, dan potensi ekonomi pesisirnya. Kegiatan ini karena itu memadukan ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok agar peserta dapat mengaitkan materi dengan persoalan perencanaan yang mereka hadapi.

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas pemangku kepentingan Desa Para dalam memahami pembangunan berkelanjutan dan menyusun komponen RPJMDes secara lebih sistematis, partisipatif, dan berbasis data. Target perubahan meliputi peningkatan pemahaman konseptual, kemampuan mengidentifikasi potensi dan masalah desa, penggunaan analisis SWOT dan analisis kebutuhan, perumusan tujuan strategis, serta penyusunan program prioritas dan matriks perencanaan.

METODE

Desain

Kegiatan pengabdian menggunakan desain pelatihan dan pendampingan partisipatif yang berfokus pada penguatan kapasitas pemangku kepentingan Desa Para dalam menyusun RPJMDes. Kegiatan melibatkan 15 peserta yang terdiri atas 10 orang perangkat desa, 3 orang anggota Pokdarwis, dan 2 orang anggota MTK.

Intervensi menggunakan tiga metode utama, yaitu ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok. Ketiga metode dirancang secara terpadu agar peserta memperoleh landasan konseptual sekaligus kesempatan mengaplikasikan materi dalam latihan penyusunan RPJMDes.

Pendekatan partisipatif diterapkan dengan melibatkan peserta dalam berbagi pengalaman, mengidentifikasi potensi dan masalah desa, menyusun komponen dokumen, serta membahas hambatan perencanaan. Desain kegiatan disesuaikan dengan karakteristik Desa Para sebagai wilayah kepulauan yang memiliki potensi sumber daya pesisir, tetapi menghadapi keterbatasan aksesibilitas, infrastruktur dasar, kapasitas administrasi, dan literasi data.

Prosedur

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu ceramah, praktik, dan diskusi.

Tahap ceramah

Ceramah dilaksanakan pada tahap awal untuk memberikan landasan pengetahuan mengenai pembangunan desa berkelanjutan, tata kelola pemerintahan desa, pemerintahan yang tangkas dan adaptif, serta kedudukan RPJMDes. Materi menekankan keterpaduan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam perencanaan pembangunan.

Peserta memperoleh penjelasan bahwa RPJMDes merupakan peta jalan pembangunan desa untuk jangka waktu delapan tahun yang disusun berdasarkan data, analisis kondisi desa, kebutuhan prioritas, dan aspirasi masyarakat. Materi juga menekankan pentingnya aparatur bekerja secara responsif, transparan,

akuntabel, dan mampu beradaptasi terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis kepulauan.

Ceramah disampaikan secara interaktif dengan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, berbagi pengalaman, dan menanggapi materi. Pendekatan tersebut digunakan agar konsep pembangunan berkelanjutan dan tata kelola adaptif dapat dikaitkan langsung dengan potensi perikanan, wisata bahari, kerentanan ekologis, dan keterbatasan infrastruktur Desa Para.

Pada akhir tahap ceramah, fasilitator merangkum konsep utama dan menghubungkannya dengan tahapan penyusunan RPJMDes sebagai persiapan menuju sesi praktik.

Tahap praktik

Praktik menjadi tahapan utama dalam kegiatan karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh pada sesi ceramah. Peserta dilibatkan dalam latihan penyusunan bagian-bagian RPJMDes secara bertahap dengan pendampingan fasilitator. Tahapan praktik meliputi, identifikasi potensi dan permasalahan desa, penyusunan visi dan misi pembangunan desa, perumusan tujuan dan sasaran strategis, penentuan kebutuhan dan prioritas pembangunan, penyusunan program prioritas desa, dan penyusunan matriks perencanaan RPJMDes.

Tahap diskusi

Diskusi dilaksanakan setelah ceramah dan praktik untuk memperdalam pemahaman serta menelaah hasil latihan. Peserta diberikan ruang untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, kesulitan, dan hambatan yang mereka hadapi selama kegiatan maupun dalam perencanaan pembangunan di Desa. Diskusi difokuskan pada aspek yang masih memerlukan penguatan, seperti perumusan indikator program, penyusunan matriks perencanaan, penentuan prioritas, penggunaan hasil analisis kebutuhan, dan pengintegrasian hasil musyawarah Desa ke dalam RPJMDes. Melalui diskusi terbuka, peserta bertukar pengalaman mengenai tantangan dan strategi penyusunan RPJMDes. Proses ini menghasilkan pembelajaran kolektif dan membantu fasilitator mengidentifikasi kebutuhan pendampingan lanjutan.

Evaluasi

Evaluasi menggunakan pendekatan formatif dan kualitatif yang dilaksanakan selama ceramah, praktik, dan diskusi. Evaluasi bertujuan menilai keterlibatan peserta, pemahaman terhadap materi, kemampuan menerapkan alat analisis, dan kualitas hasil latihan kelompok.

Indikator evaluasi meliputi: keaktifan peserta; kemampuan menjelaskan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola desa; kemampuan mengidentifikasi potensi dan masalah Desa Para; kemampuan menggunakan analisis SWOT dan analisis kebutuhan; kemampuan menyusun visi, misi, tujuan, sasaran, program prioritas, dan matriks perencanaan; kemampuan merumuskan indikator; kemampuan mengintegrasikan aspirasi masyarakat; serta kemampuan bekerja sama dan memahami pembagian peran dalam Tim Penyusun RPJMDes. Bukti evaluasi diperoleh dari pengamatan fasilitator, hasil latihan kelompok, tanggapan peserta, dan diskusi penutup. Kegiatan tidak menggunakan instrumen pretest-posttest terstandar sehingga perubahan pengetahuan dan keterampilan tidak dihitung secara kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan diikuti oleh 15 peserta yang terdiri atas 10 orang perangkat desa, 3 orang anggota Pokdarwis, dan 2 orang anggota MTK. Berdasarkan evaluasi proses, rangkaian ceramah, praktik,

dan diskusi menunjukkan indikasi peningkatan pemahaman konseptual, keterampilan teknis, serta kesiapan peserta untuk terlibat dalam penyusunan RPJMDes secara lebih partisipatif dan sistematis.

Peningkatan Pemahaman Konseptual Peserta

Berdasarkan tanggapan peserta dan hasil diskusi, tahap ceramah membantu memperluas pemahaman mengenai pembangunan berkelanjutan, tata kelola adaptif, dan kedudukan RPJMDes sebagai dokumen strategis. Sebagian peserta pada awal kegiatan masih menekankan pembangunan fisik dan infrastruktur, sedangkan setelah pembahasan mereka dapat menjelaskan keterkaitan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan desa.

Pemahaman tersebut relevan dengan Desa Para sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi perikanan, wisata bahari, dan budaya lokal, tetapi juga menghadapi kerentanan ekologis serta keterbatasan infrastruktur. Dalam diskusi, peserta dapat menghubungkan materi dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya laut yang mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem, kesejahteraan masyarakat, dan peluang ekonomi lokal.

Materi mengenai tata kelola tangkas memperluas pemahaman peserta bahwa kemampuan adaptif tidak hanya berkaitan dengan teknologi atau modernisasi administrasi. Peserta mengidentifikasi keterbukaan komunikasi, penggunaan data, kolaborasi dengan masyarakat, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan menyesuaikan program sebagai unsur penting dalam menghadapi perubahan kebutuhan serta kondisi geografis.

Ceramah juga memperkuat pemahaman mengenai RPJMDes sebagai peta jalan pembangunan delapan tahun. Peserta memahami bahwa dokumen tersebut perlu didasarkan pada data, analisis kondisi desa, kebutuhan prioritas, dan aspirasi masyarakat. Aparatur tidak hanya bertugas menulis dokumen, tetapi juga memfasilitasi hubungan antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan.



Gambar 1. Penyampaian materi melalui metode ceramah dalam kegiatan pengabdian

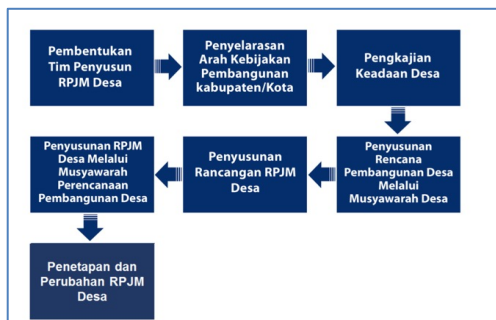
Peningkatan Keterampilan Teknis Penyusunan RPJMDes

Tahap praktik menunjukkan indikasi peningkatan keterampilan teknis peserta. Peserta terlibat dalam simulasi penyusunan RPJMDes mulai dari identifikasi potensi dan masalah, penyusunan visi dan misi, perumusan tujuan dan sasaran strategis, hingga penyusunan program dan matriks prioritas pembangunan. Peserta menggunakan analisis SWOT, analisis kebutuhan, dan teknik penjaringan aspirasi masyarakat. Hasil latihan kelompok menunjukkan bahwa peserta dapat mengidentifikasi perikanan, wisata bahari, dan budaya lokal sebagai kekuatan Desa Para serta mengenali keterbatasan transportasi, infrastruktur dasar, literasi digital, dan ketersediaan data sebagai kelemahan yang perlu ditangani.

Latihan analisis kebutuhan membantu peserta membedakan kebutuhan prioritas masyarakat dari keinginan yang hanya mewakili kepentingan kelompok tertentu. Peserta diarahkan

untuk menggunakan data, hasil musyawarah Desa, serta kondisi sosial dan geografis sebagai dasar penetapan prioritas. Melalui latihan tersebut, peserta mulai memahami hubungan antara masalah, potensi, tujuan, program, kegiatan, indikator, dan kebutuhan anggaran.

Praktik dilakukan secara berkelompok untuk menyerupai proses kerja pemerintahan desa. Pembagian kelompok membantu peserta memahami peran kepala desa, sekretaris desa, kepala seksi, kepala urusan, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat dalam penyusunan RPJMDes. Materi praktik juga mencakup pembentukan Tim Penyusun RPJMDes, penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten, pengkajian keadaan desa, penyusunan Rancangan RPJM Desa, penyusunan Rencana Pembangunan Desa Melalui Musyawarah Desa, dan penetapan dan perubahan RPJM Desa sesuai kerangka regulasi terbaru



Gambar 2 Tahapan Mekanisme Penyusunan RPJM Desa

Hasil latihan menunjukkan bahwa peserta mulai mampu menyusun hubungan logis antara potensi dan permasalahan desa dengan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program prioritas. Namun, peserta masih memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam merumuskan indikator program, menyusun matriks perencanaan, mengolah data desa, dan mengintegrasikan hasil musyawarah masyarakat ke dalam dokumen RPJMDes.

Hambatan dan Pembelajaran Kolektif

Diskusi mengidentifikasi beberapa hambatan dalam perencanaan pembangunan, yaitu keterbatasan literasi digital, kesulitan mengumpulkan dan memperbarui data akibat kondisi geografis, koordinasi antarbidang yang belum optimal, serta kesulitan menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan anggaran desa.

Diskusi terbuka memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertukar pengalaman mengenai penjangkaran aspirasi, transparansi penggunaan anggaran, pengumpulan data, dan penentuan prioritas. Peserta juga membahas kesulitan merumuskan indikator dan menjaga konsistensi antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta matriks kegiatan.

Pembelajaran kolektif membantu peserta memahami bahwa RPJMDes tidak dapat disusun secara individual atau hanya dibebankan kepada aparat tertentu. Penyusunan dokumen memerlukan komunikasi, pembagian peran, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan, dan unsur masyarakat.

Kombinasi ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok memberi peserta kesempatan untuk memperoleh landasan konseptual, menerapkan materi, serta merefleksikan hambatan. Pola tersebut sejalan dengan temuan kegiatan penguatan kapasitas sebelumnya yang menekankan pentingnya latihan teknis dan pendampingan kontekstual, bukan sekadar penyampaian informasi satu arah (Sari et al., 2022; Sujana et al., 2020).

Perubahan orientasi peserta dari pembangunan yang terutama bersifat fisik menuju pemahaman yang mencakup dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi relevan dengan kebijakan SDGs Desa dan kajian pembangunan desa berkelanjutan (Assajid et al., 2024; BPK RI, 2023). Bagi Desa Para, orientasi tersebut penting agar pengembangan perikanan dan wisata bahari mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta pemerataan manfaat.

Pemahaman tersebut juga memperlihatkan pentingnya menghubungkan materi umum dengan konteks lokal. Keterbatasan transportasi, perubahan cuaca, dan keterbatasan layanan publik menuntut aparat mampu menetapkan prioritas secara fleksibel tanpa mengabaikan akuntabilitas dan kebutuhan masyarakat.

Penguatan pemahaman mengenai tata kelola adaptif didukung oleh kajian agile governance yang menekankan penyesuaian terhadap konteks organisasi, penyederhanaan proses, kolaborasi, dan perbaikan berkelanjutan (Malik et al., 2023; Maulana et al., 2023). Namun, klaim peningkatan pada kegiatan ini tetap harus dibaca sebagai hasil evaluasi proses karena tidak diuji dengan instrumen kuantitatif.

Praktik analisis SWOT dan analisis kebutuhan membantu peserta menyusun gambaran yang lebih sistematis mengenai kondisi internal dan eksternal desa. Analisis kebutuhan penting agar prioritas pelatihan dan program didasarkan pada kesenjangan nyata antara kondisi aktual dan kondisi yang diharapkan (Darmawan et al., 2021).

Pelibatan perangkat desa, Pokdarwis, dan MTK dalam latihan serta diskusi memperkuat orientasi partisipatif. Kajian mengenai perencanaan desa di Indonesia menunjukkan bahwa partisipasi perlu berlangsung secara inklusif dan tidak terbatas pada perwakilan elite atau tahapan musyawarah formal (Damayanti & Syarifuddin, 2020; Widadi & Eldo, 2023). Oleh karena itu, penyusunan RPJMDes selanjutnya perlu memperluas keterlibatan kelompok perempuan, pemuda, nelayan, penyandang disabilitas, dan unsur masyarakat lainnya.

Hambatan literasi digital, ketersediaan data, dan koordinasi menunjukkan bahwa kualitas RPJMDes tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis dokumen. Tata kelola yang baik membutuhkan partisipasi, transparansi, pembagian peran, dan komunikasi antarpemangku kepentingan (Handayani et al., 2023; Hertati et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan memberi dasar awal untuk pendampingan lanjutan. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menyimpulkan besarnya peningkatan pengetahuan, keberlanjutan keterampilan, kualitas akhir dokumen RPJMDes, atau dampaknya terhadap pelayanan publik.

Implikasi dan Keberlanjutan

Model pelatihan yang mengintegrasikan ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok dapat digunakan sebagai pendekatan awal untuk memperkuat kapasitas aparat pada wilayah kepulauan. Pendekatan kontekstual memungkinkan materi disesuaikan dengan potensi, masalah, struktur kelembagaan, dan keterbatasan geografis desa. Keberlanjutan kegiatan memerlukan pendampingan dalam finalisasi RPJMDes, penguatan literasi data, perumusan indikator yang terukur, penggunaan sistem informasi desa, serta pemantauan penerapan hasil pelatihan. Pemerintah Desa Para juga perlu memperluas keterlibatan unsur masyarakat agar proses perencanaan lebih inklusif, transparan, dan akuntabel.

KETERBATASAN

Kegiatan ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, kegiatan hanya melibatkan 15 peserta dari satu desa sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi ke desa kepulauan lain. Kedua, evaluasi dilakukan secara formatif dan kualitatif melalui pengamatan fasilitator, hasil latihan kelompok, dan diskusi tanpa menggunakan instrumen pretest–posttest yang tervalidasi, rubrik penilaian dokumen, atau penilai independen. Oleh karena itu, perubahan pengetahuan dan keterampilan yang dilaporkan harus dipahami sebagai indikasi berdasarkan evaluasi proses, bukan sebagai peningkatan kuantitatif yang telah diuji. Ketiga, kegiatan belum mencakup pemantauan jangka menengah untuk menilai retensi pengetahuan, finalisasi dan pengesahan RPJMDes, penerapan program prioritas, maupun dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik. Kegiatan lanjutan perlu menggunakan instrumen pengukuran yang terstruktur, penilaian kualitas dokumen oleh pihak independen, analisis menurut kelompok peserta, dan evaluasi tindak lanjut setelah implementasi.

SIMPULAN

Berdasarkan evaluasi proses, kegiatan pengabdian di Desa Para menunjukkan indikasi penguatan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan RPJMDes yang lebih sistematis, partisipatif, berbasis data, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan. Ceramah interaktif, praktik terbimbing, dan diskusi kelompok membantu peserta memahami tata kelola adaptif, fungsi strategis RPJMDes, serta keterkaitan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam perencanaan desa.

Hasil latihan menunjukkan bahwa peserta mulai mampu mengidentifikasi potensi dan masalah desa, menggunakan analisis SWOT dan analisis kebutuhan, merumuskan tujuan strategis, serta menyusun program prioritas dan matriks perencanaan. Kegiatan juga memperkuat kesadaran mengenai pentingnya partisipasi masyarakat, data yang relevan, dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Temuan tersebut belum menunjukkan besarnya efektivitas program karena tidak didukung pengukuran pretest–posttest dan evaluasi tindak lanjut. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan lanjutan untuk memperkuat literasi data, kapasitas digital, perumusan indikator, finalisasi RPJMDes, dan pemantauan penerapannya. Model kegiatan ini dapat dipertimbangkan untuk desa kepulauan lain dengan penyesuaian terhadap konteks dan kebutuhan setempat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada LPPM Universitas Sam Ratulangi atas dukungan dan pendanaan yang diberikan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Skema PKM-K2 sehingga program dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan.

REFERENSI

- Ameliya, T. M. (2023, June 7). Ditjen Bina Pemdes siap beri pelatihan kapasitas pemdes di Sangihe. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/3576363/ditjen-bina-pemdes-siap-beri-pelatihan-kapasitas-pemdes-di-sangihe>
- Aminah, S., & Sutanto, H. P. (2018). Analisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2(3), 149–160. <https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160>
- Assajid, S. R., Khoiron, & Sekarsari, R. W. (2024). Kebijakan pembangunan berkelanjutan desa: Langkah strategis pemenuhan SDGs Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 10(2), 170–180. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.5>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe. (2024). Kecamatan Tatoareng dalam angka 2023/2024. <https://sangihekab.bps.go.id/id/publication/2024/09/26/2135d672c455e7534e95c233/kecamatan-tatoareng-dalam-angka-2023-2024.html>
- Damayanti, R. A., & Syarifuddin. (2020). The inclusiveness of community participation in village development planning in Indonesia. *Development in Practice*, 30(5), 624–634. <https://doi.org/10.1080/09614524.2020.1752151>
- Darmawan, D., Sudrajat, I., Maulana, M. K. Z., & Febriyanto, B. (2021). Perencanaan pengumpulan data sebagai identifikasi kebutuhan pelatihan lembaga pelatihan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 5(1), 71–88. <https://doi.org/10.15294/pls.v5i1.30883>
- Handayani, E., Garad, A., Suyadi, A., & Tubastuvi, N. (2023). Increasing the performance of village services with good governance and participation. *World Development Sustainability*, 3, 100089. <https://doi.org/10.1016/j.wds.2023.100089>
- Hertati, D., Nurhadi, N., & Arundirasari, I. (2022). Pemanfaatan sistem informasi desa untuk peningkatan kapasitas aparatur desa. *Berdikari: Jurnal Inovasi dan Penerapan Ipteks*, 10(2), 236–248. <https://doi.org/10.18196/berdikari.v10i2.13610>
- Malik, I., Wahid, N., & Busri. (2023). Implementasi agile governance pada reformasi birokrasi 4.0 di Puslatbang KMP LAN Kota Makassar. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(1), 85–119. <https://doi.org/10.52316/jap.v19i1.134>
- Maulana, A., Puspitaningtyas, Z., Suryawati, D., & Murdyastuti, A. (2023). Local government acceleration towards agile governance. *Journal of Humanities and Social Sciences Studies*, 5(1), 105–113. <https://doi.org/10.32996/jhss.2023.5.1.14>
- Nikodimus. (2022). Penguatan kapasitas perangkat desa dalam meningkatkan sumber daya aparatur desa. *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, 20(1), 127–131. <https://doi.org/10.51826/fokus.v20i1.588>
- Nofiansyah. (2019). Pemetaan sumber daya aparatur desa di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Riset Pembangunan*, 2(1), 47–66. <https://doi.org/10.36087/jrp.v2i1.46>
- BPK RI. (2023). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/263793/permendesa-pdtt-no-6-tahun-2023>
- BPK. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/283617/uu-no-3-tahun-2024>
- BPK RI. (2026). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/349409/pp-no-16-tahun-2026>
- Sari, Y. K., Sholihah, Q., & Wanusmawatie, I. (2022). Evaluasi program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah desa: Kajian pelatihan penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa Kabupaten Bojonegoro pada Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 8(2), 214–224. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2022.008.02.11>
- Sujana, E., Suci, N. M., Yasa, I. N. P., & Dewi, N. A. W. T. (2020). Penguatan kapasitas Pemerintah Desa Wanagiri melalui pendampingan penyusunan RPJMDes dan pertanggungjawaban dana desa. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(4), 531–542. <https://doi.org/10.31949/jb.v1i4.521>
- Widadi, T., & Eldo, D. H. A. P. (2023). Urgensi kader pemberdayaan masyarakat desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan desa. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 2(2), 109–120. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v2i2.1870>